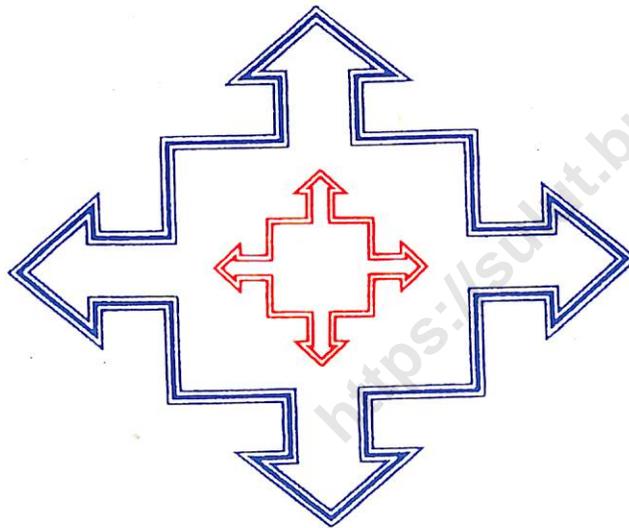




KATALOG BPS : 4103.71

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROPINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2002**



BPS

**BADAN PUSAT STATISTIK PROPINSI SULAWESI UTARA
MANADO - INDONESIA**

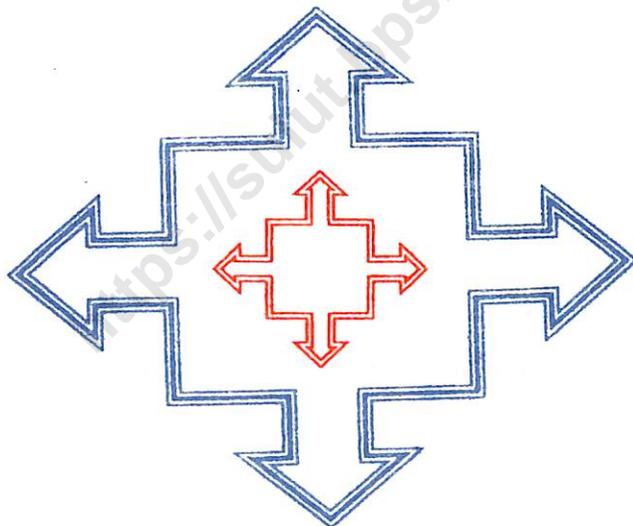
102004
61
0 - 2002
-3-5

BADAN PUSAT STATISTIK
SULAWESI UTARA



KATALOG BPS : 4103.71

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROPINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2002**



BPS

**BADAN PUSAT STATISTIK PROPINSI SULAWESI UTARA
MANADO - INDONESIA**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SULAWESI UTARA TAHUN 2002

ISBN : 979.488.4561
No. Publikasi : 71520.0301
Katalog BPS : 4103.71
Ukuran Buku : 21 x 29 cm
Jumlah Halaman : 25 halaman

Naskah : Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat

Gambar Kulit : Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat

Diterbitkan Oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Utara

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat adalah salah satu publikasi Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Utara dan merupakan publikasi rutin setiap tahun. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kesejahteraan rakyat yang telah terjadi dan kecenderungan perubahannya sampai pada tahun 2002.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2002 ini menyajikan informasi dasar mengenai enam bidang, yaitu Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pola Pengeluaran dan Perumahan. Diharapkan publikasi ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan rakyat di Propinsi Sulawesi Utara secara umum berdasarkan enam bidang tersebut.

Data yang digunakan dalam publikasi ini hanya mencakup aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan yang luas itu dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Sumber data mutakhir yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP) dan data sekunder lainnya (Sulawesi Utara Dalam Angka).

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, sehingga publikasi ini dapat diterbitkan disampaikan terimah kasih. Disadari bahwa penerbitan ini masih mengandung beberapa kekurangan, oleh karena itu semua kritik dan saran guna perbaikan publikasi ini kami sangat harapkan.

Manado, Agustus 2003

Kepala Badan Pusat Statistik
Propinsi Sulawesi Utara



Drs. JASA BANGUN, MSi
NIP. 340005025

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	IV
Daftar Gambar.....	v
1. KEPENDUDUKAN.....	1
2. KESEHATAN.....	5
3. PENDIDIKAN.....	10
4. TENAGA KERJA.....	15
5. PENGELUARAN.....	19
6. PERUMAHAN.....	21

Daftar Tabel

	Halaman
1. KEPENDUDUKAN	
1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	1
1.2 Persentase Penduduk dan Kepadatan tahun 2002.....	3
1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan tahun 2002.....	4
1.4 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002.....	4
2. KESEHATAN	
2.1 Persentase Penduduk Yang Berobat jalan Selama Sebulan terakhir Menurut Fasilitas Kesehatan Tahun 2002	6
2.2 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2001 dan 2002	7
2.3 Persentase Penduduk Sakit Yang Rawat Inap di RS/Klinik Dengan Menggunakan Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002.....	8
2.3 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Minum (air bersih).....	9
3. PENDIDIKAN	
3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 dan 2002...	11
3.2 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Tahun 2002.	12
3.3 Ratio Guru dan Murid Tahun 2000/2001 dan 2001/2002.....	13
4. TENAGA KERJA	
4.1 Variabel Ketenagakerjaan Tahun 2001 dan 2002	15
4.2 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2001 dan 2002	18

4.3 Persentase Pekerja Menurut Jam Kerja Tahun 2001 dan 2002.....	19
---	----

5. PENGELUARAN

5.1 Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 1996, 1999 dan 2002.....	21
---	----

6. PERUMAHAN

6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Rumah Tahun 2001 dan 2002	23
6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan Tahun 2001 dan 2002	25

<https://sulut.bps.go.id>

Daftar Gambar

	Halaman
1. Perkembangan Jumlah penduduk Sulawesi Utara tahun 1980 – 2001.....	2
2. Persentase penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan Tahun 2002.....	13
3. Persentase pekerja menurut Sektor Lapangan Kerja Tahun 2002.....	17

<https://sulut.bps.go.id>

1. KEPENDUDUKAN

Penduduk masih merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Karena dalam proses pembangunan penduduk merupakan faktor yang dominan, sebab bukan saja sebagai pelaksana pembangunan tetapi juga menjadi sasaran pembangunan itu sendiri.

Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan program otonomi daerah maka permasalahan penduduk ini tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena dengan jumlah penduduk yang besar, sudah tentu dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik. Sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Karena itu pembangunan nasional diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang seiring dengan pembangunan ekonomi.

1.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

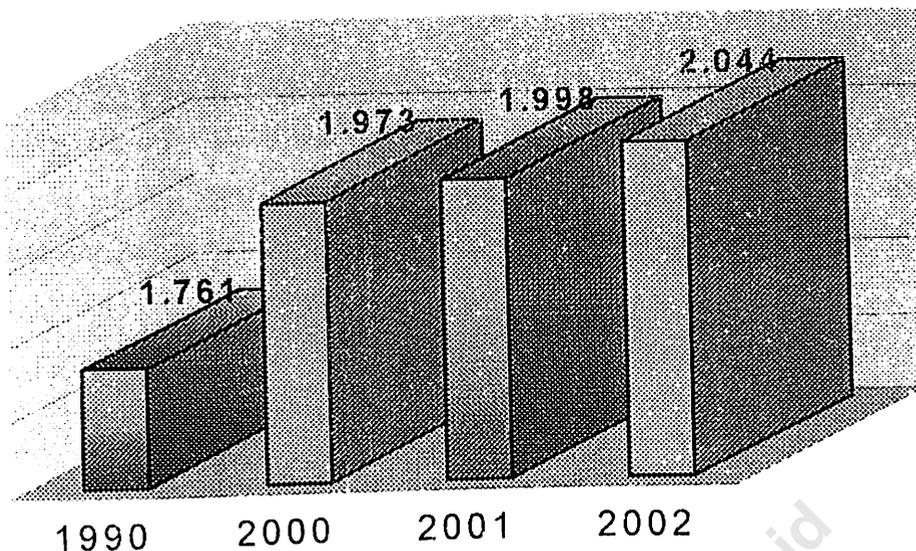
Penduduk Propinsi Sulawesi Utara pada tahun 1990 berjumlah 1,761 juta. Tahun 2000 jumlahnya 1,973 juta jiwa dengan pertumbuhan 1,18 persen. Selanjutnya pada tahun 2002 jumlahnya bertambah menjadi 2.044. juta yang terdiri dari laki-laki 1.052. juta atau sekitar 51,46 persen sedangkan perempuan 991 ribu jiwa atau sekitar 48,54 persen.

Tabel 1.1. Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (juta)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)
1990	1,761	1,52
2000	1,973	1,18
2001	1,998	1,30
2002	2,044	2,28

Sumber: Susenas 2002

**Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Sulawesi Utara
Tahun 1990-2002**



1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk.

Penduduk propinsi Sulawesi Utara tersebar secara tidak merata di masing-masing daerah kabupaten/kota. Keadaan ini boleh dikatakan bersifat universal karena hampir ditemukan diseluruh Indonesia. Ada kabupaten/kota yang banyak penduduknya tetapi wilayahnya sempit, sehingga keadaan objektif inilah yang mungkin merupakan suatu dasar bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan mobilitas penduduk agar dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan.

Secara umum penyebaran penduduk Sulawesi Utara terkonsentrasi pada daerah Kabupaten yaitu sekitar 73,69 persen. Kalau ditinjau dari segi kepadatan penduduk, ternyata kota Manado memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu 2.474,11 jiwa per km². sedangkan yang paling rendah terdapat di kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sekitar 52,93 jiwa per km² (tabel 1.2).

Tabel 1.2. Persentase Penduduk dan kepadatan Tahun 2002

Kabupaten/Kota	% Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km)
(1)	(2)	(3)
Bolmong	21,64	52,93
Minahasa	39,23	191,39
Satal	12,82	115,75
Mnado	19,00	2.474,11
Bitung	7,31	491,40
SULUT	100.00	133.83

Sumber : Susenas 2002

1.3 Angka Beban Ketergantungan

Dampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan diantaranya dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk yang tidak produktif (0-14 tahun dan 65+). Hal ini berimplikasi pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan.

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa kota Manado merupakan daerah yang memiliki beban ketergantungan terkecil yaitu hanya 36,32 % sedangkan yang memiliki beban ketergantungan terbesar terdapat di kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebesar 52,32 %.

Tabel 1.3. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2002

Kab/Kota	0-14 Thn	15-64 Thn	65 + Thn	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bolmong	30,56	65,65	3,79	52,32
Minahasa	25,27	68,27	6,51	46,58
Satal	25,06	68,79	6,15	45,37
Manado	22,99	73,40	3,61	36,23
Bitung	30,73	66,38	2,89	50,65
Sulut	26,36	68,59	5,06	45,80

Sumber : Susenas 2002

1.4. Rasio Jenis Kelamin

Melalui tabel 1.4 dapat dilihat bahwa rasio jenis kelamin tahun 2002 sebesar 106.20, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan yaitu dari 100 penduduk perempuan terdapat 106 laki-laki. Hal ini dapat di sebabkan karena pada tahun 2002 terjadi kelahiran dan atau migrasi masuk penduduk laki-laki lebih besar dari pada penduduk perempuan . Jika dilihat dari masing-masing kabupaten/kota maka sex rasio terbesar terdapat di kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebesar 109. Sedangkan sex rasio terkecil terdapat di kota Bitung yaitu sebesar 101.7.

Tabel 1.4 Rasio Jenis Kelamin Menurut kabupaten/kota Tahun 2002

Kab/Kota	L	P	Sex Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	230.804	211.611	109.0
Minahasa	411.978	389.798	105.6
Satai	135.605	126.455	107.2
Manado	199.014	189.421	105.0
Bitung	75.346	74.309	101.7
Sulut	1052.747	991.324	106.1

Sumber : Susenas 2002

2. KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan rakyat yang sangat penting, karena dengan kesehatan yang baik akan menjadi salah satu kondisi yang menentukan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Untuk mengukur tingkat kesehatan sangat diperlukan indikator relevan yang menunjang.

Pembangunan kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan murah, merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Ini semua memerlukan upaya dari pemerintah dengan memberikan penyuluhan kesehatan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kesehatan.

2.1 Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Gambaran tentang pemanfaatan fasilitas kesehatan dapat diukur dengan menggunakan tingkat kontak masyarakat dengan fasilitas kesehatan dalam berobat jalan. Melalui tabel 2.1 dapat dilihat bahwa selama tahun 2001 – 2002 tingkat kontak masyarakat dengan fasilitas kesehatan dalam berobat jalan selama sebulan menunjukkan kenaikan pada jenis pelayanan kesehatan seperti RS pemerintah, puskesmas, pustu, pengobatan tradisional dan polindes serta posyandu. Namun demikian dari beberapa jenis pelayanan kesehatan yang mengalami peningkatan, jenis pelayanan di puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang relatif banyak dikunjungi oleh masyarakat.

Tingkat kunjungan berobat jalan selama satu bulan terakhir adalah banyaknya/frekwensi kunjungan seseorang untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Secara keseluruhan tingkat kunjungan penduduk untuk berobat jalan pada tahun 2001 dan 2002 cenderung memilih praktek dokter, namun tingkat kunjungan penduduk ke pelayanan praktek dokter mengalami penurunan dari 31.07 persen pada tahun 2001 menjadi 30.41 persen pada tahun 2002 (tabel 2.1)

Tabel 2.1 Persentase penduduk yang berobat jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2001-2002

Fasilitas Kesehatan (1)	Tingkat Kunjungan	
	2001 (2)	2002 (3)
RS Pemerintah	3.67	3.91
RS Swasta	7.63	2.61
Praktek Dokter	31.07	30.41
Puskesmas	25.41	28.55
Pustu	12.01	14.38
Poliklinik	1.14	0.55
Praktek Petugas Kesehatan lain	17.88	13.51
Tradisional	0.25	0.50
Polindes	0.28	4.32
Posyandu	0.65	1.26
	100.00	100.00

Sumber : Susenas 2001,2002

2.2 Penolong Kelahiran

Angka Kematian bayi sangat di pengaruhi oleh tenaga penolong kelahiran, pemberian ASI, makanan bayi serta pemberian imunisasi. Meskipun banyak ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya, tetapi masih banyak terdapat persalinan yang ditolong oleh tenaga non medis. Sesuai dengan program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004, sasaran yang akan dicapai dalam program ini salah satunya adalah meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis kesehatan menjadi 75 persen. Dengan adanya kampanye Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan *Safe Motherhood*, serta penempatan tenaga bidan di desa-desa diharapkan tujuan dari propenas akan tercapai. Karena dengan semakin tingginya angka penolong persalinan oleh tenaga medis, maka akan dapat menekan angka kematian bayi dan ibu.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2001 dan 2002 dapat dilihat bahwa di Sulawesi Utara penolong persalinan terakhir terbanyak dilakukan oleh tenaga bidan yaitu sekitar 60.63 persen pada tahun 2001 dan 57.51 persen pada tahun 2002. Sedangkan yang terendah adalah persalinan yang dilakukan oleh tenaga non medis yaitu famili lain (0.50 persen) pada tahun 2001 dan lainnya (0.03 persen) pada tahun 2002.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa persalinan yang ditolong oleh tenaga dukun masih menempati peringkat ke tiga tertinggi setelah dokter yaitu sekitar 14.94 persen pada tahun 2001 dan 13.75 persen pada tahun 2002. Namun demikian selama periode 2001 – 2002 hanya tenaga dokter dan tenaga famili yang mengalami kenaikan, sedangkan persentase penolong kelahiran oleh bidan, tenaga medis lain, dukun dan lainnya semuanya mengalami penurunan (tabel 2.2)

Tabel. 2.2 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2001-2002

Penolong kelahiran (1)	2001 (2)	2002 (3)
Dokter	17.22	25.05
Bidan	60.63	57.51
Tenaga Medis Lain	6.05	2.63
Dukun	14.94	13.75
Famili	0.50	1.03
Lainnya	0.64	0.03
Jumlah	100.00	100.00

2.2 Status kesehatan

Status kesehatan merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sekaligus merupakan dambaan setiap orang, karena pentingnya akan hal ini maka setiap orang akan berupaya untuk memperolehnya.

Salah satu hambatan seseorang dalam menjalankan aktifitas setiap hari adalah penyakit, karena selain akan menderita juga akan merugikan secara material, bahkan akan menyita waktu untuk meninggalkan segala aktifitas yang harus dilakukan setiap hari.

Persentase penduduk sakit yang mengalami rawat inap di rumah sakit/klinik yang menyediakan tenaga medis di Sulawesi Utara tahun 2002 ada 9,61 persen dimana laki-laki 4,39 persen dan perempuan 5,22 persen.

Tabel 2.3 Persentase penduduk sakit yang menjalani rawat inap di Rumah sakit/Klinik yang menyediakan tenaga Medis menurut Kabupaten/Kota dan jenis Kelamin tahun 2002

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		L + P
	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	3,47	2,84	6,31
Minahasa	4,64	4,37	9,02
Sangihe Talaud	5,36	7,93	13,29
Manado	3,85	6,73	10,59
Bitung	5,42	8,78	14,2
Sulawesi Utara	4,39	5,22	9,61

Sumber : Susenas 2002

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota maka penduduk laki-laki dan perempuan yang mengalami rawat inap tertinggi terdapat di Kota Bitung yaitu masing-masing sebesar 5,42 persen dan 5,22 persen. Sedangkan yang terendah terdapat di kabupaten Bolaang Mongondow yaitu laki-laki sebesar 3,47 persen dan perempuan 2,84 persen.

2.4 Indikator Penunjang

Salah satu penunjang akan kesehatan dan gizi masyarakat adalah air, karena merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia terutama untuk minum (air bersih) karena secara normal manusia membutuhkan 1,5 liter atau kurang lebih 8 gelas yang harus di minum setiap hari.

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk air minum di Sulawesi Utara pada tahun 2002 ada 98,66 persen berarti hanya 1,34 persen yang menggunakan bukan air bersih (air sungai dan air hujan) dan tahun 2001 sebesar 98,37 persen. Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menyadari

pentingnya mengkonsumsi air bersih untuk digunakan sebagai air minum, bahkan untuk semua kabupaten/kota, jika dibandingkan dengan tahun 2001 semuanya ada kenaikan persentasenya (tabel 2.4).

Tabel 2.4 Persentase Rumah tangga yang menggunakan Air minum (air bersih)

Kabupaten/Kota	2001	2002
(1)	(2)	(3)
Bolaang Mongondow	100,0	100,0
Minahasa	100,0	100,0
Sangihe Talald	87,24	88,19
Manado	99,46	100,0
Bitung	99,85	99,85
Sulawesi utara	98,37	98,66

Sumber : Susenas 2002

3. PENDIDIKAN

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Karena pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan sumber daya manusia.

Pendidikan mempunyai peranan penting dan sudah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap orang. Hal ini karena pendidikan dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dibidang pendidikan memerlukan peran serta aktif yang tidak saja dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat dan seluruh keluarga. Adanya kepedulian yang tinggi dari ketiga faktor tersebut harus berlangsung secara terus menerus dan dilaksanakan secara terpadu.

3.1 Angka Melek Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan pada tingkat makro adalah kemampuan baca tulis dari penduduk usia 10 tahun ke atas. Penduduk dikatakan melek huruf jika mampu membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Secara umum angka melek huruf penduduk Sulawesi Utara tahun 2002 telah mencapai 98,83 persen, dengan demikian tinggal terdapat 1.17 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih buta huruf. Angka ini relatif meningkat apabila dibandingkan dengan keadaan tahun 2001 yang sebesar 98,21 persen (tabel 3.1).

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 dan 2002

Kabupaten/Kota	2001	2002
(1)	(2)	(3)
B.Mongondow	97,18	95,02
Minahasa	98,16	99,40
Sangihe Talaud	97,57	97,64
Kota Manado	99,62	99,79
Kota Bitung	98,82	98,47
Propinsi	98,21	98,83

Sumber : Susenas 2002

3.2 Partisipasi Sekolah

Melalui angka partisipasi sekolah dapat diketahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada. Angka ini merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada suatu jenjang pendidikan. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan dalam bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Jelasnya peningkatan angka partisipasi sekolah mengandung arti semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah.

Angka Partisipasi sekolah di Sulawesi Utara tahun 2002 jika dibandingkan dengan tahun 2001 di semua jenjang pendidikan baik Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum ada sedikit penurunan angka partisipasinya. Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur 7 – 12 tahun atau SD pada tahun 2002 dari 97, 24 turun menjadi 95,54 pada tahun 2001. Untuk tingkat Sekolah Lanjutan Pertama dari 84,86 turun menjadi 81,76 sedangkan untuk kelompok umur 16 –18 tahun atau tingkat Sekolah Menengah Umum dari 53,67 turun menjadi 53,03 hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

perlu ditingkatkan, serta perlu menekan angka putus sekolah baik kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Tabel 3.2. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Tahun 2002.

Kelompok Umur	2001	2002
(1)	(2)	(3)
7-12 Tahun (SD)	97,24	95,54
13-15 Tahun (SMP)	84,86	81,76
16-18 Tahun (SMA)	53,67	53,03

Susenas : Susenas 2002

3.3 Fasilitas Pendidikan

Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan sebagai fasilitas penunjang pendidikan haruslah diperhatikan, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sangat dipengaruhi juga oleh fasilitas pendidikan antara lain rasio murid dan guru. Seperti yang terlihat pada tabel 3.3, pada jenjang pendidikan SD, SLTP dan SMU rasio murid guru pada tahun 2001/2002 tercatat bahwa setiap guru masing-masing membawahi sekitar 14, 13, 15 murid. Hal ini dapat dikatakan bahwa beban setiap guru di SD, SLTP maupun di SMU tidak begitu berat, sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik.

Tabel 3.3. Rasio Murid-Guru Tahun 2000/2001 dan 2001/2002

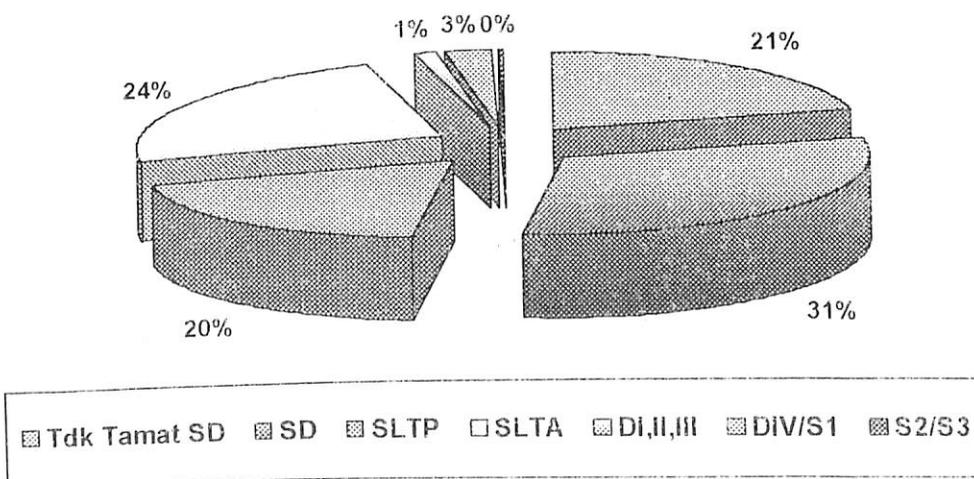
Jenjang Pendidikan	2000/2001	2001/2002
(1)	(2)	(3)
Sekolah Dasar	15,38	14,44
S M P	13,9	13,35
S M A	16,1	15,23

Sumber: Sulut Dalam Angka Tahun 2001, Susenas 2002

3.4 Tingkat Pendidikan Ditamatkan

Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk berumur 10 tahun ke atas. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan ditamatkan memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia.

Gambar 2. Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan Tahun 2002



Seperti terlihat pada gambar 2 ternyata, pada tahun 2002 31 persen penduduk Sulawesi Utara masih berpendidikan Sekolah Dasar. Sementara itu penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan SMP ke atas sekitar 69 persen.

<https://sulut.bps.go.id>

Sumber : Susenas 2001, 2002

Uraian	2001	2002
(1)	(2)	(3)
Penduduk Usia Kerja	1.649.488	1.699.411
Angkatan Kerja	807.954	903.893
TPAK	48.99	53.19
TPT	8.94	10.47
TSPt	26.57	32.59
TKK	91.06	89.53

Tabel 4.1 Variabel Ketenagakerjaan Tahun 2001 dan 2002

Ketenagakerjaan merupakan suatu aspek yang mendasar karena pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Perluasan kesempatan kerja sangat urgent untuk diimplementasikan agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar setiap tahunnya.

Penyediaan tenaga kerja sifatnya terbatas, karena tidak semua penduduk merupakan tenaga kerja. Selain itu tidak semua tenaga kerja terlibat dalam dalam kegiatan ekonomi. Jumlah angkatan kerja tergantung pada jumlah penduduk usia kerja, semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka akan semakin besar pula jumlah angkatan kerja.

Penduduk usia kerja yaitu penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Pada tahun 2002 jumlah penduduk yang termasuk usia kerja di Sulawesi Utara berjumlah 1.699.411 orang atau sekitar 83.13 persen dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut untuk angkatan kerja sebanyak 903.893 orang, hal ini jika dibandingkan dengan tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 11.91 persen selama satu tahun terakhir.

4. TENAGA KERJA

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja yaitu mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Proporsi angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja biasa disebut dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa pada tahun 2002 TPAK mencapai 53,19 persen dimana telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2001 yaitu 48,99 persen. Banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja menunjukkan jumlah penduduk yang siap terlibat dalam angkatan kerja.

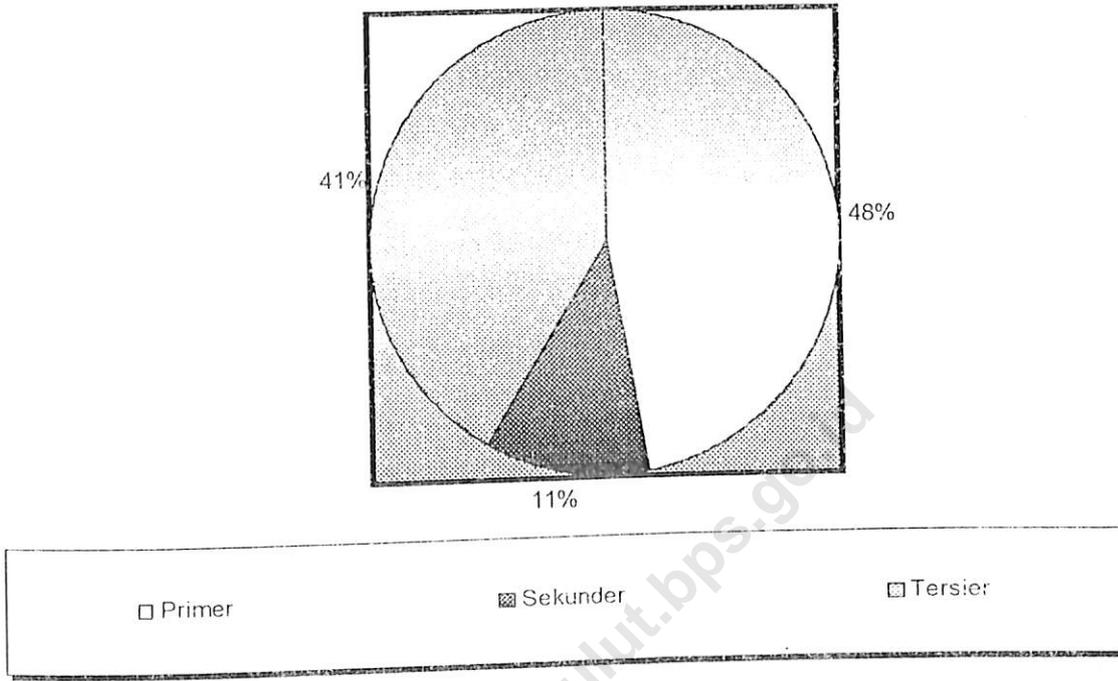
Tingkat Kesempatan Kerja yaitu banyaknya penduduk usia kerja yang terserap dalam pasar kerja atau penduduk usia kerja yang bekerja, pada tahun 2001 sebesar 91,06 persen turun menjadi 89,53 persen pada tahun 2002. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja, sedangkan angkatan kerja yang tidak berhasil terserap merupakan masalah karena mereka terpaksa menganggur.

Selanjutnya melalui tabel 4.1 juga terlihat adanya kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 8,94 persen tahun 2001 menjadi 10,47 pada tahun 2002. Sementara itu terjadi hal yang sama untuk TSPT (penduduk yang tergolong Setengah Pengangguran Terpaksa) yaitu mereka yang bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, pada tahun 2001 sebesar 26,57 naik menjadi 32,59 pada tahun 2002.

4.2 Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Agaknya struktur perekonomian masih didominasi sektor Primer (pertanian) dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 47,14 persen, disusul Sektor Tersier (Transportasi dan komunikasi, Keuangan, jasa perdagangan) yaitu sebesar 41,44, kemudian sektor Sekunder (pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air serta konstruksi) yaitu sebesar 11,42 persen. (Gambar 3)

Gambar 3. Persentase Pekerja Menurut Sektor Lapangan Kerja Tahun 2002



4.2. Satus Pekerjaan

Selain lapangan pekerjaan, karakteristik lain yang bisa menggambarkan keadaan ketenagakerjaan adalah status pekerjaan. Status pekerjaan dibedakan atas tujuh kelompok yaitu berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan/pekerja dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja tidak dibayar.

Melalui tabel 4.2 terlihat bahwa, dari keseluruhan penduduk yang bekerja sebagian besar berstatus sebagai buruh/karyawan dibayar. Pada tahun 2001 persentase penduduk yang bekerja dan berstatus sebagai buruh/pekerja dibayar sekitar 32.11 persen. Pada tahun berikutnya keadaan ini mengalami peningkatan sebesar 4.55 persen sehingga menjadi 36.66 persen.

Persentase pekerja yang berstatus sebagai berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain menempati urutan ke dua. Pada tahun 2001 persentase pekerja yang berstatus berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sekitar 25.48

Dengan melihat jumlah jam kerja bagi para pekerja, dapat diungkapkan fenomena setengah pengangguran pada kelompok penduduk yang bekerja. Setengah pengangguran didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki jam kerja dibawah jam kerja normal. Sementara jumlah jam kerja normal dalam satu minggu adalah 35 jam atau lebih, sehingga dengan demikian bila jumlah jam kerja dalam satu minggu kurang dari 35 jam dikatakan termasuk setengah pengangguran.

Seperti diketahui bahwa keberadaan para pekerja yang ada di provinsi Sulawesi Utara umumnya sebagai buruh karyawan tentunya selalu terikat

Jam Kerja

No	Status Pekerjaan	2001	2002
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bersaha Sendiri Tanpa Bantuan Orang lain	25.48	27.85
2.	Bersaha Dengan Bantuan Buruh Tidak Tetap	22.12	15.99
3.	Bersaha Dibantu Buruh Tetap	5.28	4.45
4.	Buruh/Karyawan/Pekerja Dibayar	32.11	36.66
5.	Pekerja Bebas di Pertanian	2.09	1.05
6.	Pekerja Bebas di Non Pertanian	1.30	1.47
7.	Pekerja Tidak dibayar	11.62	12.52

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2001 dan 2002

persen, hal ini mengalami peningkatan sebesar 2.37 persen pada tahun 2002 sehingga menjadi 27.85. Sebaliknya untuk pekerja yang berstatus bersaha sendiri dibantu buruh tetap pada tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 6.13 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 22.12 persen. Pola seperti ini juga terlihat pada tiga status pekerjaan yang lain walaupun tingkat penurunannya tidak sama.

dengan jam kerja sehingga terdapat sekitar 63.59 persen pekerja yang bekerja di atas 35 jam dalam seminggu. Kenyataan ini memberikan indikasi bahwa masih terdapat sebanyak 36.40 persen penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam .

Persentase penduduk yang bekerja yang memiliki jumlah jam kerja normal pada tahun 2001 sekitar 65.54 persen dan pada tahun 2002 sekitar 63.59 persen. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah jam kerja bagi para pekerja, sehingga mengakibatkan Tingkat Setengah Pengangguran Terpaksa (TSPT) mengalami peningkatan pada tahun 2002.

Tabel 4.3. Persentase Pekerja Menurut Jam Kerja

Jam Kerja	Tahun	
	2001	2002
(1)	(2)	(3)
Di bawah normal (< 35 jam /minggu)	34,46	36,41
Normal (> 35 jam /minggu)	65,54	63,59
Total Pekerja	100	100

Sumber : Susenas 2001, 2002

5. PENGELUARAN

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak.

Tingkat pendapatan oleh BPS didekati dari besarnya pengeluaran per kapita sebulan yang dapat diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Oleh karena itu sesuai metode penghitungan penduduk miskin yang ditetapkan oleh BPS, bahwa batas minimum pengeluaran per kapita yang ditetapkan sebagai garis kemiskinan adalah sebesar 90 ribuan untuk propinsi Sulawesi Utara.

Pola Pengeluaran

Secara umum data konsumsi / pengeluaran Susenas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat pengeluaran kebutuhan / permintaan (*demand*) terhadap makanan. Tingkat pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan terjadi peningkatan untuk porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan umumnya rendah, sementara elastisitas terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung/diinvestasikan.

Melalui tabel 5.1 disajikan data persentase pengeluaran rata-rata pekapita untuk kelompok makanan dan bukan makanan keadaan tahun 1996,

1999 dan 2002. Selama tiga tahun terakhir (1999-2002) terjadi penurunan pengeluaran makanan sebesar 5.93 persen yaitu dari 66.12 persen pada tahun 1999 menjadi 60.19 persen tahun 2002. Sebaliknya persentase pengeluaran untuk bukan makanan terjadi peningkatan dari 33.88 persen pada tahun 1999 menjadi 39.81 persen pada tahun 2002.

Tabel 5.1 Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Menurut kelompok Pengeluaran tahun 1996, 1999 dan 2002

Kelompok Pengeluaran	1996	1999	2002
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	56.87	66.12	60.19
Non Makanan	43.13	33.88	39.81

Sumber : Susenas 2001, 2002

6. PERUMAHAN

Sebagai salah satu kebutuhan dasar (*basic needs*) dalam kehidupan manusia, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi fungsinya sebagai tempat tinggal lebih menonjol. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini terkait dengan tingkat kesejahteraan penghuninya.

Kepemilikan tempat tinggal merupakan indikator awal dalam menentukan tingkat kesejahteraan atau kemapanan sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki tempat tinggal sendiri relatif lebih mapan dibandingkan rumah tangga yang tidak/belum memiliki tempat tinggal sendiri.

6.1 Luas lantai Hunian

Luas lantai sering kali dijadikan sebagai indikator dalam menentukan tingkat kecukupan dari fasilitas rumah. Rumah yang terlalu sempit akan berdampak kurang baik bagi penghuninya, apalagi kalau rumah yang sempit tersebut ditempati oleh banyak anggota rumah tangga. Rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif luas sehingga penghuninya tidak berdesakan. Pada tahun 2002 di Sulawesi Utara tercatat sekitar 58,29 persen rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan ukuran luas lantainya sebesar $< 50\text{m}^2$, dari jumlah tersebut terlihat ada sedikit kenaikan jika dibanding dengan tahun 2001 yaitu sebesar 57,64 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2002 ada sekitar 41,71 persen rumah tangga yang tinggal di rumah yang luas lantainya lebih besar atau sama dengan 50 m^2 (tabel 6.1).

Tabel 6.1. Persentase Rumah tangga menurut kualitas Perumahan Tahun 2000 dan 2001

Kualitas Rumah	Tahun	
	2001	2002
(1)	(2)	(3)
Luas lantai < 50 m ²	57,64	58,29
Lantai tanah	8,91	9,30
Atap Layak (bukan dedaunan)	91,14	91,18
Dinding permanen (tembok dan kayu)	92,24	92,97

Sumber : Susenas 2002

Kualitas perumahan di Sulawesi Utara menunjukkan adanya penurunan sedikit. Hal ini dapat dilihat dari persentase rumah tinggal yang berlantai tanah telah mengalami peningkatan dari 8,91 persen di tahun 2001 menjadi 9,30 persen di tahun 2002 ini. Walaupun demikian untuk rumah dengan dinding permanen, dalam kurun waktu setahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 92,24 persen di tahun 2001 menjadi 92,97 persen pada tahun 2002, sementara itu juga rumah yang beratap bukan dedaunan (layak) meningkat dari 91,14 persen tahun 2001 menjadi 91,18 persen di tahun 2002.

6.2 Fasilitas Perumahan

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditempati adalah tersedianya listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

Seperti terlihat pada tabel 6.2, bahwa pada tahun 2002 terdapat sebanyak 90,05 persen rumah tangga telah menggunakan listrik sebagai sumber

penerangannya. Meskipun demikian angka ini terjadi penurunan sedikit jika dibandingkan tahun 2001 yaitu sebesar 93,23 persen

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan air untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan lain-lain. Dari sekian banyak keperluan air tersebut, keperluan yang utama adalah untuk minum. Ketersediaan air bersih dalam jumlah cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak yang merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah daerah.

Rumah tangga yang memiliki sumber air bersih (leding, pompa, sumur atau mata air terlindung) pada tahun 2002 sebesar 81,52 persen keadaan ini menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2001 yang sebesar 82,65 persen.

Disamping itu salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan kualitas air yang berasal dari pompa, sumur atau mata air terlindung yaitu harus memiliki jarak paling dekat 10 meter dari tempat penampungan kotoran/tinja. Pada tahun 2002 rumah tangga yang memiliki sumber air minum dengan jarak lebih dari 10 meter ke penampungan kotoran/tinja sebanyak 48,37 persen. Keadaan ini terjadi penurunan sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2001 yang sebesar 50,90 persen.

Kelengkapan sarana untuk tempat tinggal yang tidak kalah pentingnya adalah jenis fasilitas tempat buang air besar. Tersedianya fasilitas ini menunjukkan bahwa bangunan tempat tinggal sudah memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Menurut jenis fasilitas buang air besar, pada tahun 2002 tercatat terdapat sebanyak 53,29 persen rumah tangga telah menggunakan fasilitas tempat buang air besar dengan tangki septik. Keadaan ini juga cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2001 yaitu sekitar 56,03 persen

Tabel 6.2 Persentase Indikator Fasilitas Perumahan 2001 dan 2002

Fasilitas Perumahan	Tahun	
	2001	2002
(1)	(3)	
Peñerangan Listrik	93,23	90,05
Sumber Air Bersih	82,65	81,52
Jarak Sumber Air Minum Ke penampungan tinja >10 m	50,90	48,37
Jamban dengan Tangki Septik	56,63	53,26

Sumber : Susenas 2002

<https://sulut.bps.go.id>